

PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS

(Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

RIKA ANGGRAENI

NIM/BP : 14043080/2014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AGGRESSIVENESS*

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)

Oleh:

RIKA ANGGRAENI
14043080

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2018 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 7 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak
NIP. 195801019 200604 2 002

Pembimbing II



Vita Fitria Sari, SE, M.si
NIP. 19880507 201404 2 001

PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS
(Studi empiris : Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)

Rika Anggraeni

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: rikaanggraeni9690@gmail.com

Abstract

This study aims to see the influence of political connections on tax aggressiveness. The population in this study are all manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. The sample in this study used purposive sampling technique. The analysis was carried out by using a simple regression model. The results of this study indicate that political connections have no significant effect on tax aggressiveness with CETR measurements (sig 0.318), SHELTER (sig 0.385) and PRED_UTB (sig 0.083). Political connections have no effect on tax aggressiveness. Political connections have no effect on tax aggressiveness. Based on the results of the study, it is recommended for management to consider the risk of actions that will be carried out related to taxes and for further researchers it is recommended to add other independent variables that are thought to affect tax aggressiveness.

Keyword : Political connection, tax aggressiveness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness* dengan pengukuran CETR (sig 0.318), SHELTER (sig 0.385) dan PRED_UTB (sig 0.083). Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi pihak manajemen untuk mempertimbangkan resiko atas tindakan yang akan dilakukan terkait pajak dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas yang lain yang diduga berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

Kata kunci : Koneksi politik, *tax aggressiveness*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, karena itu pemerintahan di Indonesia masih akan terus menerus melaksanakan pembangunan disegala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat menciptakan kesejahteraan nasional, seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun untuk menjalankan kegiatan pembangunannya tentu akan diperlukan dana yang cukup banyak dalam menjalankan kegiatan pembangunan nasional. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia yang terbesar, yaitu 1.618,1 triliun rupiah (85,4 persen) dari total pendapatan negara 1.894,7 triliun rupiah dalam APBN 2018 (www.kemenkeu.go.id). Salah satu permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak yang optimal adalah *tax aggressiveness*.

Pemungutan pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan perpajakan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Wicaksono 2017).

Tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajak sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya bertentangan dengan tujuan

pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Yoehana, 2013). Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban usaha sehingga perlu dilakukan usaha-usaha untuk meminimalkan pajak agar laba yang diperoleh lebih maksimal.

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dan perusahaan menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2010:12) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif merupakan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007; Kurniasih dan Sari, 2013).

Strategi yang biasanya digunakan untuk menghindari pajak (Pohan 2016:23), yakni; (a) *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang, (b) *Tax Evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, (c) *Tax saving* (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli

produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar. Menurut Chen (2010) istilah kata *tax aggressiveness* dapat juga dikatakan sebagai istilah Penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009) *tax aggressiveness* adalah suatu aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*) untuk menurunkan laba kena pajak. *Tax aggressiveness* ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (*lawfull*). *Tax aggressiveness* mengarah bagaimana usaha perusahaan dapat membayar pajak serendah-rendahnya secara legal dan aman tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan. Mardiasmo (2016:12) penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Senada dengan Susyanti dan Dahlan (2015:12) penghindaran pajak adalah perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan perundangan.

Pendapat lain yang menyatakan adanya penghindaran pajak di Indonesia berasal dari *Global Financial Integrity*. Berdasarkan laporan *global financial integrity* tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar sebagai salah satu negara berkembang dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp 2.442 triliun (www.liputan6.com). Fenomena yang ada, wajib pajak akan berusaha mencari kelemahan peraturan undang-undang perpajakan dengan cara mencari celah untuk menyalahi agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin tanpa melakukan pelanggaran perpajakan. Faktor yang melatar belakangi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu

perusahaan yang mempunyai koneksi politik di dalamnya. Wicaksono (2017) juga berpendapat tindakan agresivitas pajak pada umumnya sering dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai koneksi politik.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Menurut Purwanto (2011) perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Sesuai dengan pernyataan Ade Irawan salah satu Koordinator *Indonesia Corruption Watch* (IWC) menilai selama ini kedudukan para pengusaha dalam politik sering kali disalahgunakan untuk memperluas akses serta pasar bisnisnya dan juga biasanya pemilik kepentingan akan masuk dalam kancah politik, seperti DPR dengan memilih komisi yang berhubungan dengan bisnisnya. Tentu hal ini dilakukan agar dapat mempermudah akses proyek dan perizinan lainnya. (www.republika.co.id)

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memilih pihak-pihak dalam struktur organisasi baik itu komisaris ataupun direksi yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah (Fisman 2001). Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan *tax aggressiveness* dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam partai politik atau pemerintahan dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit

sehingga laba perusahaan semakin maksimal.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan koneksi politik dengan *tax aggressiveness*. Penelitian yang dilakukan Kim dan Zhang (2014) menghubungkan pengaruh koneksi politik terhadap tindakan pajak agresif menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik lebih memiliki agresivitas pajak dibanding perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Menurut Butje dan Tjondo (2014), koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara Marfu'ah (2015) menyimpulkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditinjau dari hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil dari masing-masing penelitian dan adanya beberapa kasus di dalam fenomena yang telah diuraikan dilatar belakang mengenai penghindaran pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan tema tentang *tax aggressiveness* dengan melihat faktor koneksi politik yang ada di dalam perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada alat ukur yang digunakan untuk mengukur *tax aggressiveness*. Penelitian ini, peneliti menggunakan tiga alat ukur yang digunakan dalam mengukur *tax aggressiveness* yaitu CETR, SHELTER, dan PRED_UTB (Rego dan Wilson 2012). Selain itu, perbedaan penelitian terletak pada sampel dan tahun penelitian, sehingga dapat memberikan tambahan informasi mengenai kondisi perpajakan Indonesia. Kontribusi dari penelitian ini terletak pada penambahan *literature* terkait praktek *tax aggressiveness* di Indonesia, yang dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia.

Perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi maupun barang

setengah jadi hingga proses menjual kembali, sehingga dalam segala aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : apakah perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung melakukan *tax aggressiveness*?

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Pandangan *agency theory* melihat penyebab munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak principal dan agent. Jansen and Mackling (1976) menjelaskan hubungan keagenan merupakan "suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) yang memerintah orang lain (*agent*) untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal". Sehingga teori agensi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami isu pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Teori ini mengakibatkan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham.

Prinsip utama teori agensi ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (agensi) yaitu manajer entitas bisnis. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana seseorang atau lebih (principal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan mendelegasikan sebagai kewenangan pengambilan keputusan agen (Victory 2016).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan pemerintah yang telah listing di BEI. Konflik kepentingan yang timbul dari

teori keagenan ini akan mempengaruhi *tax aggressiveness*. Di satu sisi, manajemen mempunyai pandangan bahwa manajemen harus mendapatkan laba yang tinggi dengan menghasilkan beban pajak yang serendah-rendahnya, disisi lain pihak pemerintah (fiskus) yang merangkap sebagai pembuat regulasi perpajakan berharap akan adanya pemasukan sebesar-besarnya dari sektor pajak. Perbedaan sudut pandang tersebut tentunya akan menyebabkan konflik diantara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan

Pengertian pajak

Pangertian pajak sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 (2013:2) berbunyi “*pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan di gunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr MJH. Smeets dalam bukunya *De Overheidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) dalam Waluyo (2010:2) menyatakan Pajak adalah prestasi kepada pihak pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakanya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Pengertian *Tax aggressiveness*

Tax aggressiveness adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) (Frank,

Lynch, dan Rego 2009). *Tax aggressiveness* ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (*lawfull*). Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran Pajak adalah upaya mengefesiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2016:11). Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah segala kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Senada dengan Suyanti dan Dahlan (2015;12) penghindaran pajak adalah perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan perundangan. Penggunaan kata *tax aggressiveness* dapat juga dikatakan sebagai istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) Chen (2010).

Koneksi politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan anantara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti 2017).

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan dengan cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik di percaya sebagai sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz and Gee 2006). Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak pemerintah (Pronoto dan Widagdo 2016). Hubungan istimewa terhadap pihak pemerintah bisa diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, bisa dalam

bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hubungan istimewa antara pemilik perusahaan dengan pihak pemerintah tentu pemilik perusahaan merupakan adalah tokoh politik terkemuka yang dimana merupakan anggota dewan baik itu pemerintah pusat maupun daerah atau sebagai bagian dari anggota partai politik.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2011) menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Faccio (2006) menyatakan sebuah perusahaan di anggap memiliki koneksi politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau yang berkaitan erat dengan politikusnatas atau partai politik. Sedangkan menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN dan BUMD. Koneksi politik juga dapat di lihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Adhikari *et al.*, 2006). Sedangkan Fuccio (2006) juga menjelaskan hubungan dekat yang dimiliki perusahaan berkoneksi politik yang dimaksud meliputi:

1. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen.
2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala

negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya.

3. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung kedalam dunia politik..

Dalam penelitian ini untuk menentukan dalam perusahaan tersebut memiliki adanya koneksi politik di lihat dari 3 kategori:

1. Perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan partai politik
3. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan pejabat pemerintah dalam periode ini maupun periode sebelumnya.

Dalam menentukan perusahaan mempunyai koneksi politik digunakan variabel *dummy*. dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang memenuhi indikator dan kriteria di atas dan 0 jika tidak memenuhi indikator dan kriteria di atas.

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan *tax aggressiveness* dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting didalam pemerintahan dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan lebih maksimal. Kim dan Zhang (2014) berpendapat perusahaan dengan koneksi politik mampu melakukan *tax planning* yang lebih agresif karena adanya perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Keuntungan lain yang di dapat oleh perusahaan yang berkoneksi politik adalah akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman modal, resiko

pemeriksaan pajak rendah dan kekuatan pasar yang lebih kuat

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Aggressiveness*

Perusahaan berkoneksi politik akan memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak yang rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menetapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Senada dengan Kim dan Zhang (2014) menyatakan dampak positif dari perusahaan memiliki koneksi politik yaitu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti menghindari audit pajak. Perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak di karenakan pemeriksaan pajak yang rendah. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negative yang ada.

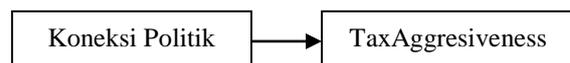
Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya koneksi politik yang ada pada perusahaan, perusahaan tersebut harus memiliki minimal 1 dari 3 kategori, kategorinya adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan partai politik
3. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan pejabat pemerintah dalam periode saat ini maupun periode sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan koneksi politik

dengan *tax aggressiveness*. Penelitian yang di lakukan Kim dan Zhang (2014) menghubungkan pengaruh koneksi politik terhadap tindakan pajak agresif menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik lebih memiliki agresivitas pajak dibanding perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Menurut Butje dan Tjondo (2014), koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara Marfu'ah (2015) menyimpulkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung melakukan *tax aggressiveness*



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kausatif (*causative*). Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan yang mempublikasikan annual report pada situs resmi perusahaan periode 2014-2017

Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat dalam periode 2014-2017 yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan mempublikasikan *annual report* selama periode pengamatan yaitu dari

tahun 2014 sampai tahun 2017, dengan jumlah populasi 145 perusahaan.

pada tahun berjalan

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data documenter. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi berdasarkan literature yang telah dipublikasikan oleh perusahaan.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax aggressiveness* variabel independennya terdiri dari koneksi politik.

Pengukuran Variabel

1. Tax aggressiveness

Model estimasi pengukuran *tax aggressiveness* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR), SHELTER, dan PRED_UTB (Rego dan Wilson 2012):

1. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Rasio ini menunjukkan proporsi dari pembayaran pajak tunai dibandingkan dengan pajak penghasilan sebelum pajak pada perusahaan. Rasio ini dapat di ukur dengan rumus :

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre-tax\ income}$$

Keterangan:

CETR : Pengukuran tarif pajak efektif berdasarkan jumlah yang dibayarkan pada tahun berjalan

Cash tax paid : Jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun berjalan

Pre-tax income :Pendapatan sebelum pajak

2. SHELTER

Shelter adalah pengukuran *tax aggressiveness* yang memprediksi bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam perlindungan pajak. Berdasarkan model Rego dan Wilson (2012):

$$SHELTER = -4.86 + BTDi_t + 4.08 \times DA - 1.41 \times LEVi_t + 0.76 \times SIZEi_t + 3.51 \times ROAi_t + 1.72 \times FORINCOMi_t + 2.43 \times R\&Di_t$$

Keterangan:

BTD : Pendapatan sebelum pajak – laba pajak yang di ukur oleh total asset

LEV : Rasio total utang terhadap total asset perusahaan i pada tahun t

DA : *Discretionary accruals*
 $DA_{Cit} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDAC_{it}$

Keterangan :

DAC : *Discretionary accruals*

TAC : *Total Accruals*

TA : *Total Assets*

NDAC : *Nondiscretionary Accruals*

SIZE : Logaritma natural dari total asset perusahaan i pada tahun t

ROA : Laba setelah pajak yang dibagi total asset perusahaan i pada tahun t

FI : Variabel indikator yang sama dengan satu untuk pengamatan perusahaan yang melaporkan penjualan ekspor dan nol sebaliknya

R & D : Biaya penelitian dan pengembangan dibagi

dengan total asset perusahaan i pada tahun t

3. PRED UTB

PRED UTB : prediksi pemanfaatan pajak yang tidak diakui pada perusahaan i pada tahun t
Prediksi dari level UTB berdasarkan model Rego dan Wilson (2012) :

$$\begin{aligned}
 PRED_UTB_{it} = & -0.004 + 0.011 \times PT_ROA_{it} + 0.001 \times \\
 & SIZE_{it} + 0.010 \times FOR_SALE_{it} + \\
 & 0.092 \times R\&D_{it} - 0.002 \times DA - 0.003 \times LEV_{it} \\
 & + 0.000 \times MTB_{it} + 0.014 \times SG\&A_{it} - \\
 & 0.018 \times SALES_GR_{it}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

PT_ROA : rasio pendapatan sebelum pajak terhadap total asset perusahaan i pada tahun t

Size : logaritma natural dari total asset perusahaan i pada tahun t

For Sale : penjualan ekspor terhadap total asset perusahaan i pada tahun t

R&D : Biaya penelitian dan pengembangan terhadap asset perusahaan i pada tahun t

LEV : rasio total utang terhadap asset perusahaan i pada tahun t

DA : *Discretionary accruals*

$$DAC_{it} = \frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} - NDAC_{it}$$

Keterangan :

DAC : *Discretionary accruals*

TAC : *Total Accruals*

TA : *Total Assets*

NDAC : *Nondiscretionary Accruals*

MTB : *market to book ratio*

SALES_GR : *pertumbuhan penjualan*

SG&A: Beban administrasi dan umum dibagi dengan total asset perusahaan i pada tahun t

2. Koneksi Politik

Dalam penelitian ini untuk menentukan dalam perusahaan tersebut memiliki adanya koneksi politik di lihat dari 3 kategori:

1. Perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan partai politik
3. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan pejabat pemerintah dalam periode ini maupun periode sebelumnya.

Untuk menentukan kepemilikan pemerintah digunakan Variabel dummy, dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki hubungan dekat yang dimiliki perusahaan berkoneksi politik seperti salah satu dari 3 kategori tersebut dan 0 jika tidak.

Model dan Teknik Analisis Data.

a. Pengujian permasalahan data Blue dalam stata

1) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan *uji Glejser*. Uji Glejser menyusul untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.

- Jika nilai sig > 0,05 maka tidak mengandung heterokedastisitas
- Jika nilai sig < 0,05 maka mengandung heterokedastisitas

2) Uji Multikolenearitas

Pengujian multikolenearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model yang digunakan.

Korelasi antara variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) dengan kriteria :

- Jika angka tolerance diatas 0,1 dan $VIF < 10$ dikatakan tidak terdapat gejala multikolenearitas.
- Jika angka tolerance diatas 0,1 dan $VIF < 10$ dikatakan terdapat gejala multikolenearitas.

Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan menggambar kan masing-masing variabel dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis mean standar devisiasi, tingkat capaian responden dan koefisien serta memberikan interpretasi analisis tersebut.

b. Metode Analisis Data

1) Uji Regresi Sederhana

Alat uji digunakan untuk regresi linear sederhana. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi sederhana dengan persamaan sebagai berikut :

Model 1

$$TACETRit = a + b_1KPit + e_{it}$$

Model 2

$$TASHELTERit = a + b_1KPit + e_{it}$$

Model 3

$$TAPRED_UTBit = a + b_1KPit + e_{it}$$

Keterangan :

TACETRit : *Tax aggressiveness* perusahaan i pada periode t yang di hitung dengan menggunakan Model TACETRit

TASHELTERit: *Tax aggressiveness* perusahaan i pada periode t yang di hitung dengan menggunakan Model TASHELTERit

TAPRED_UTBit: *Tax aggressiveness* perusahaan i pada periode t yang di hitung dengan menggunakan Model TAPRED_UTBit

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi variabel independen

KP : Koneksi Politik perusahaan i pada periode ke t

e_{it} : Standar error

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

c. Uji Hipotesis

1) Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik.

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

2) Uji t (t-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Hasil pengujian terhadap uji t adalah :

- Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
- Jika $\text{sig} < \alpha$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
- Jika $\text{sig} > \alpha$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak.

d. Defenisi Operasional

a. *tax aggressiveness*

Tax aggressiveness dapat diartikan sebagai upaya meminimalkan beban pajak dengan cara memanipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di suatu negara. *tax aggressiveness* merupakan usaha yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

b. Koneksi politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Deskriptif Variabel penelitian

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Industri periode 2014 sampai 2017. Berdasarkan metode *purposive sampling*, maka diperoleh 41 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel.

1. *Tax aggressiveness*

Model estimasi pengukuran *tax aggressiveness* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR), SHELTER, dan PRED_UTB (Rego dan Wilson 2012

- a. *Cash Effective Tax Rate*(CETR)
Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah rasio yang menunjukkan proporsi dari pembayaran pajak tunai dibandingkan dengan pajak penghasilan sebelum pajak pada perusahaan.
- b. *Shelter*
Shelter adalah pengukuran *tax aggressiveness* yang memprediksi bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam perlindungan pajak.
- c. PRED_UTB
PRED_UTB merupakan prediksi pemanfaatan pajak yang tidak diakui pada perusahaan i pada tahun t. Prediksi dari level UTB berdasarkan model Rego dan Wilson (2012).

1. CETR

Berdasarkan hasil pengolahan dengan aplikasi STATA versi 12 pada gambar 4.4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut

$$TACETR_{it} = 0.3346 - 0.0404KP_{it} + e_{it}$$

Keterangan persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta di peroleh sebesar 0.3346 yang menunjukkan bahwa tanpa

adanya pengaruh koneksi politik maka nilai CETR akan meningkat sebesar 0.3346.

2. Koneksi politik (β)

Variabel koneksi politik memiliki koefisien regresi sebesar (-0,0404). Hal ini menunjukkan jika koneksi politik meningkat satu satuan maka kecenderungan perusahaan melakukan tindakan *tax aggressiveness* akan menurun sebesar 0.0404.

Berdasarkan hasil output STATA dapat dilihat pengaruh variabel koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Koefisien regresi koneksi politik bernilai negatif sebesar 0.0404 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.318 dimana tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari α , yakni sig. $0.318 > \alpha$ (0.05). berdasarkan hasil tersebut maka koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis dengan model CETR (H_1) **ditolak**.

2. SHELTER

Berdasarkan hasil pengolahan dengan aplikasi STATA versi 12 pada gambar 4.10 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TASHELTER_{it} = 17.62868 - 0.33019K_{pit} + e_{it}$$

Keterangan persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta di peroleh sebesar 17.62868, dimana angka tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh koneksi politik maka nilai *shelter* akan meningkat sebesar 17.62868.

b. Koneksi politik (β)

Variabel koneksi politik memiliki koefisien regresi sebesar (-0.33019). Hal ini menunjukkan jika koneksi politik meningkat satu satuan maka kecenderungan perusahaan melakukan tindakan *tax*

aggressiveness akan menurun sebesar 0.33019.

Berdasarkan hasil output STATA pada gambar 4.10 dapat dilihat pengaruh variabel koneksi politik terhadap *tax aggressiveness* dengan menggunakan model *shelter*. Koefisien regresi koneksi politik pada gambar 4.10 bernilai negatif sebesar 0.33019 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.385 dimana tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari α , yakni sig. $0.385 > \alpha$ (0.05). berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis dengan model *Shelter* (H_1) **ditolak**.

3. PRED_UTB

Berdasarkan hasil pengolahan dengan aplikasi STATA versi 12 pada gambar 4.4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TAPRED_UTB_{it} = 0.0252 + 0.00201K_{pit} + e_{it}$$

Keterangan persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta di peroleh sebesar 0.0252 yang menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh koneksi politik maka nilai PREDUTB akan meningkat sebesar 0.0252.

b. Koneksi politik (β)

Variabel koneksi politik memiliki koefisien regresi sebesar 0.00201 Hal ini menunjukkan jika koneksi politik meningkat satu satuan maka kecenderungan perusahaan melakukan tindakan *tax aggressiveness* akan meningkat sebesar 0.00201.

Berdasarkan hasil output STATA pada gambar 4.14 dapat dilihat pengaruh variabel koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Koefisien regresi koneksi politik pada gambar 4.14 bernilai positif

sebesar 0.00201 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.083 dimana tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari α , yakni $sig. 0.083 > \alpha (0.05)$. Berdasarkan hasil tersebut maka koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis dengan model PREDUTB (H_1) **ditolak**.

Pembahasan

a. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*

Berdasarkan uji statistik didapat bahwa hipotesis (H_1) dengan model CETR, hipotesis (H_1) dengan model SHELTER, dan hipotesis (H_1) PREDUTB ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hasil tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang mempunyai atau tidak mempunyai koneksi politik tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax aggressiveness*. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010, perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah resikonya. Peraturan ini menggambarkan kepercayaan bahwa pada perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah tidak melakukan penghindaran pajak.

Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Dengan adanya hubungan politik baik yang mempunyai jabatan di lembaga pemerintahan atau pernah mempunyai jabatan tersebut yang dimiliki tidak membuat perusahaan

melakukan tindakan *tax aggressiveness*, karena perusahaan tidak akan merusak citra mereka di mata masyarakat. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Lestari dan Putri, 2017). Hal ini menunjukkan tidak adanya perlakuan khusus dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti menghindari audit pajak terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik (Kim dan Zhang, 2014). Sehingga dapat dikatakan adanya perlakuan yang sama, baik terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik maupun dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen mempunyai pandangan adanya keharusan untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan menghasilkan pajak yang serendah-rendahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purwati dan Sugiryarti (2017), dimana hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax aggressiveness* bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik. Model analisis dengan menggunakan CETR yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 2.5% variabel *tax aggressiveness* sedangkan model analisis dengan menggunakan SHELTER yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 20.14% variabel *tax aggressiveness* dan model analisis dengan menggunakan PRED_UTB yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu

menjelaskan 3.87% variabel *tax aggressiveness*. Hasil pengujian koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hasil perusahaan yang mempunyai atau tidak mempunyai koneksi politik tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax aggressiveness*.

b. Keterbatasan penelitian

1. Objek dalam penelitian ini hanya mengambil perusahaan manufaktur saja.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari annual report yang dipublikasikan melalui website IDX sehingga jumlah sampel menjadi terbatas karena ketidaklengkapan data.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sehingga data yang diperoleh peneliti hanya terbatas pada data yang diungkapkan oleh perusahaan pada website IDX.
4. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan hanya mampu menjelaskan 2.5% untuk CETR, 0.62% untuk SHELTER dan 3.87% untuk PRED_UTB variabel terikatnya, angka ini masih tergolong rendah.

A. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan yang dilakukan, dapat diajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah

variabel bebas lainya yang mempengaruhi *tax aggressiveness*. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat koefisien determinasi pada penelitian ini. Serta diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang bergerak dalam bidang usaha yang lebih luas dan tidak terbatas pada sector manufaktur saja sesuai kondisi yang dihadapi pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. 2017. Pengaruh *Return on asset*, *Leverage*, ukuran perusahaan dan Koneksi politik terhadap Penghindaran Pajak. Riau: Universitas Riau. Jurnal Nominal Vol. 4 No. 1
- Butje, Stella. dan Tjondro, Elisa. 2014. Pengaruh karakteristik Eksekutif dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Skripsi Universitas Kristen Petra.
- Chen, S. D., Hannlon, M., & Maydew, E.L. 2010. *Are family firms more tax aggressive than non-family firms?* *Journal of financial Economic*, 95 (1); 41-61
- Dyrenge, S. Hanlon, M., dan Maydew, E. 2010. *The effects of executives on corporate tax avoidance*. *The Accounting Review*. Vol. 85 No. 4. pp 1163-1189.
- Faccio, Mara. 2006. *Politically Connected Firms*. *The American Economic Review*, 96 (1): 369-386
- Fisman, R. 2001. *Estimating the value of political connections*. *The American Economic review*, 91 (4): 1102.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S.O. 2009. *Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting*. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/09/211727326/kemenperin-industri-manufaktur-penyumbang-pajak-terbesar> Di akses tanggal 17 Maret 2018
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> Di akses tanggal 17 Maret 2018
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2479881/10-negara-dengan-aliran-uang-gelap-ri-urutan-berapa> akses tanggal 17 Maret 2018
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/podium%20/15/04/16/nmw94f23> Di akses 17 Maret 2018
- Jansen, M dan Mecling, 1976. “ *Theori Of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, “ *Journal Of Financial Economic*, (3): 305-360.
- Kim, Chansog (Francis), and Liandong Zhang.2014. *Corporate Connections and Tax Aggressiveness*. City University of Hong Kong
- Kurniasihh, Tommy dan Sari, Maria M Ratna. 2013. Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana.
- Lestari,Gusti Ayu Widya dan Asri Dwija Putri. 2017.Pengaruh *Corporate Governance*, koneksi politik dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3
- Leuz, C., and F. Oberholzer-Gee. 2006. *Political Relationships, Global Financing, and Coporate Transparency: Evidence from Indonesia. Journal of Financial Economics* 81 (2): 411-439.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi revisi 2016*.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfu’ah, L. 2015. Pengaruh *Return On Asset, Leverage*, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Masri , I dan D.. Martani. 2012. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cost of Debt*. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Mulyani, Sri dan Darmanto. 2013 Pengaruh karakteristik perusahaan, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. E-jurnal Universitas Brawijaya
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis. Edisi 4, Jakarta: Gramedia
- Pronoto, Bayu Agung dan Widagdo, Ari Kuncoro. 2016. Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Aggressiveness*. Surakarta: Universitas sebelas maret.
- Purwanti, Shinta Meilina dan Sugiyarti, Listya. 2017. Pengaruh Instensitas Aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 5(3), 2017, 117-134
- Purwanto, Lukas. 2011. Pengaruh Koneksi politik, Kepemilikan pemerintah dan keburaman laporan keuangan terhadap kesingkronan dan resiko *crash* harga saham. Ringkasan Desertasi Program Doktor Ilmu

- Ekonomi Manajemen. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Rego, Sonja Olhofs dan Wilson, Ryan. 2011. *Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness*. Journal of Accounting Research Vol 50
- Rinaldi, dan C. Cheisviyanny. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (2):472-483.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodaologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi IV*, Jakarta: Salemba Empat
- Soemarso. 2002. *Akuntansi Statu Pengantar, Buku 1. Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, jeni dan Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan: untuk praktisi dan akademisi*. Malang: EmpatDua Media
- Victory, Galant dan Cheisviyanny, Caroline. 2016. Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Yoehana, M. 2013. Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho . 2017. Koneksi politik dan agresivitas pajak: Fenomena Indonesia. Jakarta: Universitas Airlangga
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat
- Wulandari, Tri. 2012. Analisis pengaruh *political connection* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro